BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan kualitas pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar menunjukkan masih rendah dalam arti kemampuan yang terukur. Tes diagnostik yang pernah dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa pada tingkat SD ditemukan hanya kira-kira 59 persen dari bahan pelajaran yang diajarkan (Dikdasmen, 1990).

Demikian pula kesimpulan hasil temuan penelitian Bank Dunia (1998), terungkap ada tiga faktor dominan yang menjadi kendala kualitas pendidikan dasar termasuk jenjang SD di Indonesia, dan termasuk dalam posisi krisis. Pertama, institusi pemerintah yang mengelola tingkat pendidikan dasar (SD/MI) sangat rumit dan kurang terkoordinasi, yaitu antara instansi Depdikbud, dan Depdagri, serta Depag (Implikasi dari PP No. 28 Tahun 1990, sebagai perpanjangan jiwa PP No. 65 Tahun 1951). Kedua, anggaran pendidikan nasional dikelola secara kaku dan terkotak-kotak, baik jenis anggarannya maupun instansi yang menanganinya. Anggaran Rutin (DIK) untuk pendidikan disiapkan oleh tiga instansi, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas) dan Departemen Dalam Negeri. Adapun anggaran Pembangunan (DIP) disiapkan oleh Bappenas, Depdikbud dan Depdagri. Masing-masing jenis anggaran ini memiliki ketentuan sendiri yang kaku

dan prosedur yang dianggap tidak efisien. Ketiga, manajemen sekolah yang tidak efektif. Sekolah merupakan institusi yang memegang peranan penting dalam menentukan mutu pendidikan dan kepala sekolah adalah pelaku utama yang memainkan peranan sekolah. Peningkatan mutu sekolah memerlukan kepala sekolah yang mampu: (a) memandang bahwa sumber daya yang ada adalah guna menyediakan dorongan yang memadai bagi guru-guru, (b) mencurahkan banyak waktu untuk pengelolaan dan koordinasi proses instruksional, dan (c) berkomunikasi secara teratur dengan staf, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat disekitarnya. Akan tetapi pada umumnya kepala sekolah negeri di Indonesia memiliki otonomi yang terbatas dalam mengelola sekolah dan mengalokasi sumber daya yang diperlukan. Tambahan pula, kepala sekolah kebanyakan tidak dilengkapi dengan kemampuan manajerial atau kepemimpinan yang memadai. Banyak di antara kepala sekolah yang hanya mengikuti pelatihan beberapa hari tentang konsep administrasi dan orientasi peraturan kebijakan pendidikan ketika mereka baru menjabat sebagai kepala sekolah. Selain itu promosi sebagai kepala sekolah secara ketat didasarkan pada urutan jenjang kepangkatan, dan belum ada suatu pola yang mantap (World Bank Study, 1988).

Michael Fulan (1999:12), mengemukakan isu pokok lemahnya peranan kepala sekolah dalam mengelola lembaganya. Ada tiga faktor, yaitu: pertama, pada umumnya kepala sekolah (khususnya sekolah negeri) memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola sekolahnya atau dalam memutuskan pengalokasian sumber daya. Kedua,

pada sisi kepala sekolah sendiri, diidentifikasi bahwa kepala sekolah kurang memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah dengan baik. Ketiga, kecilnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah, padahal perolehan dukungan dari masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan kepala sekolah.

Ketiga faktor tersebut, selaras dengan rekomendasi Bank Dunia untuk memberikan otonomi dalam manajemen sekolah yang accountability. Pada intinya rekomendasi tersebut memandang perlu dikembangkan manajemen yang berbasis sekolah (School-Based Management), yang dilengkapi tiga sistem pokok, yaitu: (1) kepala sekolah dipilih oleh masyarakat, (2) penghargaan terhadap kepala sekolah yang berprestasi, dan (3) program-program "modular training" untuk kepala sekolah. Acuan dari berbagai literatur yang mendukung kelebihan sistem ekonomi sekolah tersebut. Rizvi dan Lingard (1992) berargumentasi bahwa "otonomi sekolah dapat menyertakan masyarakat dalam melaksanakan keputusan-keputusan sekolah". Sudut pandang lain dikemukakan oleh Peach (1994) yang disepakati oleh Cranston (1995) dan Rizvi (1994), hal utama dari ekonomi sekolah adalah meningkatkan manajemen sekolah untuk membebaskan pengalokasian sumber daya dari kepentingan yang bersifat administratif ke kepentingan yang lebih bersifat edukatif.

Namun demikian, muncul berbagai pertanyaan apakah dengan pemberian otonomi sekolah tersebut akan menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi? Jawabannya tentu tidak, bahkan mungkin

menimbulkan masalah baru, sepanjang kriteria yang ditetapkan tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan pendapat Caldwell (1993), mengenai alasan restrukturisasi manajemen sekolah, yaitu antara lain karena salah satu atau beberapa faktor berikut; efisiensi administrasi pendidikan umum, efek resesi ekonomi, kompleksitas permasalahan pendidikan, memberdayakan guru dan orang tua, keperluan akan "fleksibility" dan "responsive", efektifitas sekolah dan "school improvement". Oleh sebab itu, diperlukan seperangkat pendekatan konseptual yang dapat memberikan arahan praktik organisasi, ekonomi dan sosial.

Asumsi yang melandasi School Based Management, merupakan adanya suatu model alternatif program desentralisasi bidang pendidikan, sebagai wujud dari reformasi pendidikan di Indonesia. Manajemen berbasis sekolah mempunyai potensi menawarkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. Model ini dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pusat, tetapi semakin meningkatkan otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber-sumber daya untuk berinovasi. Demikian pula memiliki potensi dalam menciptakan kepala sekolah, guru dan administrator yang profesional. Keadaan tersebut, diharapkan mengarah kepada kesimpulan kompetitif, responsif terhadap kebutuhan masing-masing tingkat.

Michael Fulan (1999:16), mengidentifikasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia, yakni sekolah memiliki kebebasan yang tinggi dalam

pengelolaan tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah. Namun demikian strategi yang dianggap memadai meliputi: (1) kurikulum yang bersifat inklusif; (2) proses belajar mengajar yang efektif; (3) lingkungan sekolah yang mendukung; (4) sumber daya yang berasas pemerataan; (5) standarisasi dalam bidang-bidang monitoring, evaluasi dan tes. Kelima strategi tersebut harus menyatu ke dalam empat lingkup fungsi sekolah, yakni manajemen (organisasi, kepemimpinan), proses belajar mengajar, sumber daya manusia, dan administrasi sekolah. Berdasarkan kondisi persekolahan di Indonesia, dapat diklasifikasikan sekolah yang maju, sedang dan kurang. Pada saat ini diperkirakan minimal tiga tingkatan model, yaitu sekolah yang dapat memberlakukan manajemen berbasis sekolah secara penuh, sekolah dengan berbasis sekolah tingkat menengah (sedang) dan sekolah dengan manajemen berbasis sekolah secara minimal. Kriteria dari masing-masing tingkatan tersebut ditentukan oleh sejumlah indikator.

Bertolak dari uraian yang dipersiapkan oleh pihak pemerintah, tentunya diperlukan berbagai kesiapan yang serius dari pihak aparat yang ada di lini persekolahan, melalui berbagai pemikiran dan konsep yang relevan bagi pengembangan wilayah pendidikan. Oleh sebab itu, menarik perhatian penulis untuk menganalisis upaya-upaya apa yang dapat disumbangkan kepada suatu rencana dan pelaksanaan di masa depan berkenaan dengan pendidikan, khususnya menyongsong manajemen berbasis sekolah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Salah satu

yang menjadi perhatian, baik secara konseptual maupun praktik di lapangan pendidikan, yaitu peranan kepala sekolah.

Richard C. Williams (1974:19), mengemukakan bahwa "The leader behavioral school principal is one determinant of the ability of a school to attain its stated educational goal". Pandangan tersebut, menunjukkan bahwa setiap tingkah laku kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di arahkan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, kemampuan kepemimpinan kepala sekolah dapat menciptakan inovasi dan perubahan-perubahan sekolah.

Paul Harling (1984:30) mengemukakan "The importance leadership in the process of innovation and change within an educational organizations is widely acknowledged". Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan terjadinya inovasi dan perubahan di sekolah.

Kedua pendapat tersebut, masih relevan dijadikan suatu inspirasi bahwa begitu pentingnya peran dan fungsi kepala sekolah dalam rangka pembaharuan dan perubahan di lingkungannya, yang mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan.

Secara realitas di lapangan, nampak bahwa masalah kepala sekolah masih menjadi suatu persoalan bahkan tidak terlepas dari fenomena yang muncul ke permukaan mulai dari rekruitmen (promosi), dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya, dan kemerosotan wibawa kepemimpinan. Yang seluruhnya saling terkait dalam sistem, dan mekanisme yang ada. Fenomena tersebut dihadapkan kepada berbagai percepatan tuntutan masyarakat yang begitu mendesak,

namun secara dinamika organisasi, dapat dijadikan suatu peluang untuk perbaikan di masa depan. Salah satu hal yang menurut pandangan penulis berkenaan dengan kepala sekolah, yang mengarah kepada manajemen berbasis sekolah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya suatu formulasi penilaian objektif dan selaras dengan tuntutan dan kewilayahan.

Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancasari, sebagai bagian dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sedang melakukan berbagai pembenahan dalam rangka menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. Hal tersebut, nampak dengan dirumuskannya visi, misi, dan strategi pencapaian visi misi. Dari telaah dokumentasi, rumusan visi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancasari adalah: "menjadikan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancasari dalam suasana "MEKAR SERASI", yakni menjalin kerjasama, semangat, ramah, dan sinergi". Sementara rumusan misi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancasari, yakni sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama personal, inter lembaga, antar lembaga, dan lintas lembaga.
2. Memberi motivasi untuk menumbuhkan semangat berprestasi.
3. Memberikan pelayanan prima dan ramah kepada pengguna pelayanan jasa.
4. Menciptakan sinergi pada stakeholders intern dan sinergi pada stakeholder ekstern.

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi yang telah dirumuskan, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rancasari sudah merumuskan strategi pencapaiannya, yakni sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama dengan Camat selaku Kepala Wilayah
2. Mewujudkan kerjasama dengan Cabang PGRI kecamatan.
3. Membuka peluang/kesempatan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
4. Membuka peluang kerjasama dengan lembaga bisnis.
5. Memasarkan program peningkatan mutu kepada publik.
6. Mengembangkan peran serta masyarakat melalui tokoh masyarakat.
7. Menjalin kerjasama pendidikan persekolahan dengan lembaga pemerintah setempat berserta camat/lintas sektoral.

Secara konseptual dapat dipahami bahwa dengan rumusan visi, misi dan strategi pencapaiannya tersebut, Kecamatan Rancasari dipandang siap untuk melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah. Akan tetapi hal tersebut, memerlukan kesiapan dan dukungan nyata dari segenap komponen penyelenggara pendidikan yang ada di Kecamatan Rancasari. Berangkat dari pemikiran dan kenyataan tersebut, maka upaya untuk menggali dan menghimpun kesiapan lingkungan pendidikan merupakan langkah pertama dan utama, sebagai bahan informasi dalam merumuskan strategi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

B. Paradigma Penelitian

Perilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam melaksanakn tugas sehari-hari di sekolah, sangatlah kompleks mulai dari pengelolaan ketenagaan, pendanaan, proses belajar dan berbagai kegiatan lainnya, sehingga secara rutin kepala sekolah tanpa berorientasi pada tugas sehingga kebutuhan dan pembinaan keprofesionalan dirinya sering terabaikan. Demikian pula, selama ini terjadi suatu power replection dari profil pejabat di atasnya. Artinya kepala sekolah juga tidak dapat dihindarkan dari suatu pola kepemimpinan secara nasional, yang bersifat

penyambung lidah atasan kepada para bawahannya, hal itu nampak pada rapat-rapat dinas di sekolah. Rapat dinas sudah bukan rahasia umum lagi, hanya bersifat penyampaian juklak dan juknis, kurang menumbuhkembangkan sikap demokrasi, dan menilai bawahan yang kritis dengan sikap kontra produktif.

Fakry Gafar (1985:3-4), mengemukakan bhawa kepemimpinan pendidikan, dapat dilihat dari ciri perilaku khas dalam fenomena kepemimpinan, yaitu: (1) partenalistik, (2) kepatuhan semu, (3) kemandirian lemah, (4) konsensus, dan (5) evasive (selalu dihindarkan).

Implikasinya terhadap organisasi sekolah, persepsi, sikap dan perilaku anggota tampak tidak sesuai dengan tuntutan organisasi pendidikan, yang mengarah kepada nuansa dan wacana pendidikan hakiki.

Lazaruruth (1987:60), menyatakan ada dua alasan yang menyebabkan peran kepala sekolah, yakni: (1) berkewajiban memelihara hubungan kerja sama yang erat dengan guru, personil lain, siswa dan orang tua, (2) mempunyai pengaruh yang langsung terhadap program pengajaran, rencana, dan pelaksanaan pendidikan.

Sebagaimana disebutkan di atas, dewasa ini sedang disosialisasikan Manajemen Berbasis Sekolah yang diasumsikan sebagai alternatif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian, sehebat apapun sebuah pola manajemen sekolah, terletak pada kemampuan manajerial kepala sekolah, apalagi dalam Manajemen

Berbasis Sekolah tersebut menitikberatkan pada kemampuan manajerial kepala sekolah secara otonomi.

Sisi lain yang ikut mempengaruhi keberhaslan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, adalah menyangkut perangkat perundang-undangan atau kebijakan yang memberikan dasar dalam tahap implementasinya. Implikasinya bagi para praktisi pendidikan termasuk kepala sekolah perlu memahami wawasan yang komprehensif tentang UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (UUPK). Sehubungan dengan hal tersebut. Mulyani (1999), menyebutkan tiga macam dasar pemikiran yang mendasari ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999, yakni sebagai berikut:

1. Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
2. Penyelenggaraan otonomi daerah itu diharapkan dilakukan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, kemandirian, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, menjaga keserasian hubungan pusat dan daerah, serta meningkatkan peran dan fungsi legislatif, azas dekonsentrasi yang diikuti dengan dukungan pembiayaannya.
3. Semua itu dimaksudkan guna mengahdapi tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional.

Dari kandungan yang dirumuskan dalam UU No. 22 tahun 1999, sebenarnya telah memberikan dukungan yang positif terhadap pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan pendidikan dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan kontekstual daerah. Manakala hal tersebut dilaksanakan pada level persekolahan, maka diperlukan model pengelolaan yang

searah dengan konsep otonomi atau kemandirian. Mencermati kajian konseptual tersebut, maka pengembangan kerangka atau konsep Manajemen Berbasis Sekolah penting dilaksanakan pada tatanan sekolah.

Studi tentang kelayakan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada level sekolah, perlu menyertakan analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats). Dalam analisis SWOT ini, akan diidentifikasi faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern.

Faktor-faktor intern, terdiri atas kekuatan dan kelemahan yang dapat dianalisis dalam lingkungan pendidikan sekolah dasar yang ada di Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Untuk membantu dalam menganalisis faktor-faktor intern ini dapat dilakukan dengan melakukan pendalaman terhadap komponen-komponen yang ada dalam lingkungan institusi sekolah dasar, seperti kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, kondisi pembiayaan sekolah, dan perangkat perundang-undangan pendukung.

Faktor-faktor ekstern, terdiri atas peluang dan ancaman yang dapat dianalisis dengan mencermati berbagai fenomena yang ada di luar sistem institusi sekolah dasar yang memiliki hubungan, baik secara struktural maupun fungsional dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Untuk membantu menganalisis peluang dan ancaman ini, dapat dilakukan dengan memahami komponen penunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar, seperti potensi sumber daya alam daerah setempat, dan peran serta stakeholders lokal sekolah.

Uraian konseptual di atas, dapat digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:

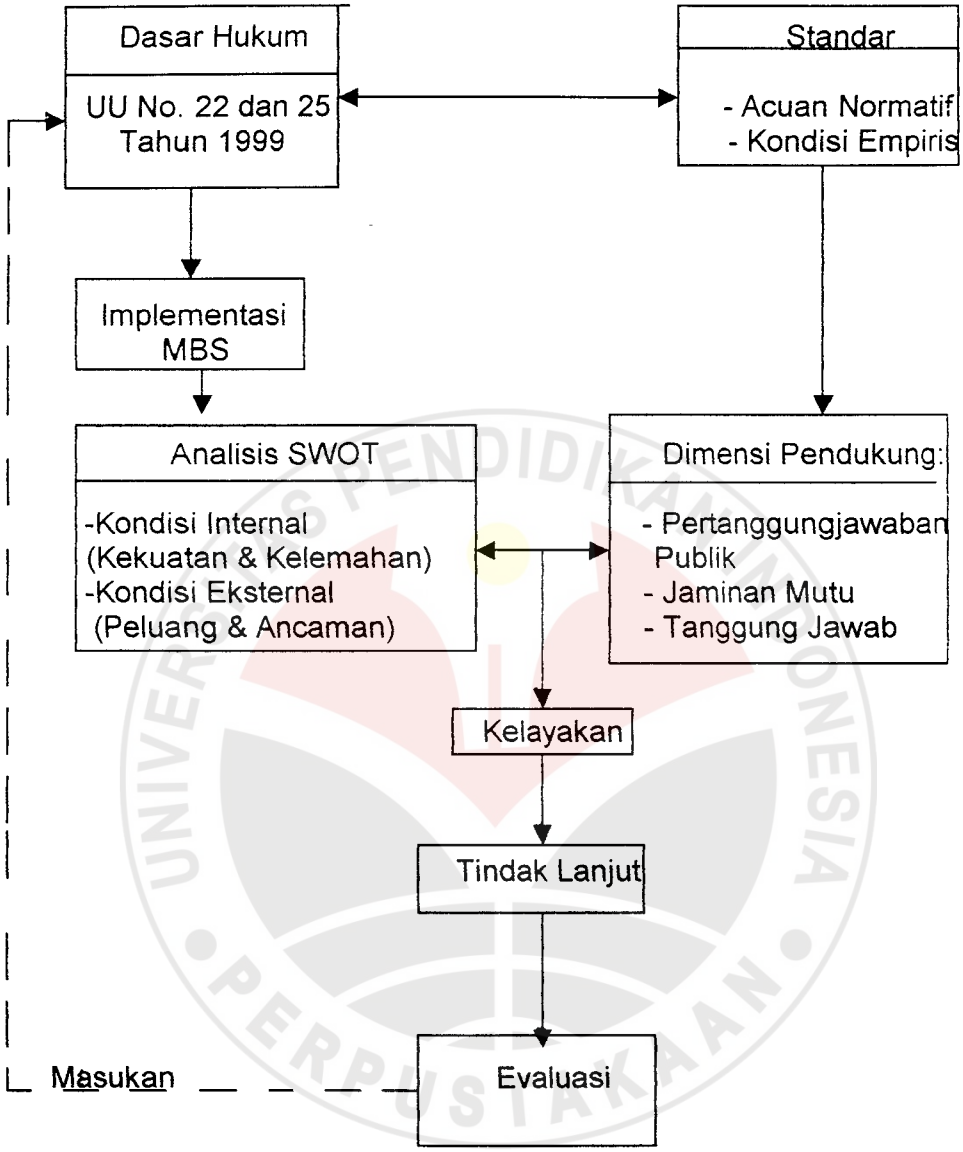

Gambar 1
Paradigma Penelitian

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis memandang bahwa kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan yang sangat menentukan dalam mengantarkan keberhasilan pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah yang sekarang sedang disosialisasikan. Sehingga dengan demikian, studi mengenai kemampuan manjaerial kepala sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah, dipandang penting untuk mendeskripsikan kondisi aktual.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan konsep Manajemen Berbasis Sekolah termasuk adalah analisis terhadap potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi dalam setting persekolahan, yang dalam hal ini adalah lingkungan kontekstual sekolah dasar di Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

Atas dasar pemikiran tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ***"Bagaimana kesiapan sekolah dasar dalam melaksanakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Rancasari Kota Bandung?".***

D. Pertanyaan Penelitian

Untuk menjabarkan rumusan masalah di atas, penulis rumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi lingkungan pendidikan di sekolah dasar se Kecamatan Rancasari manakala Manajemen Berbasis Sekolah dilaksanakan?

a. Kekuatan apa yang terdapat di lingkungan pendidikan sekolah dasar se Kecamatan Rancasari manakala Manajemen Berbasis sekolah dilaksanakan?
b. Kelemahan apa yang terdapat di lingkungan pendidikan sekolah dasar se Kecamatan Rancasari manakala Manajemen Berbasis sekolah dilaksanakan?
c. Peluang apa saja yang perlu diakomodasi oleh lingkungan pendidikan sekolah dasar se Kecamatan Rancasari manakala Manajemen Berbasis sekolah dilaksanakan?
d. Ancaman apa saja yang perlu diantisipasi oleh lingkungan pendidikan sekolah dasar se Kecamatan Rancasari manakala Manajemen Berbasis sekolah dilaksanakan?

2. Bagaimana kesiapan sekolah dasar se kecamatan Rancasari manakala Manajemen Berbasis Sekolah dilaksanakan?
   a. Bagaimana kesiapan organisasi sekolah dalam menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah?
   b. Bagaimana kesiapan pengelolaan kurikulum dalam menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah?
   c. Bagaimana kesiapan Sumber Daya Manusia dalam menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah?
   d. Bagaimana kesiapan pengelolaan siswa dalam menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah?
   e. Bagaimana kesiapan sarana dan prasarana sekolah dalam menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah?

f. Bagaimana kesiapan anggaran/pembiayaan dalam menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah?

g. Bagaimana kesiapan partisipasi masyarakat dalam menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan dimensi pendukung Manajemen Berbasis Sekolah?

a. Upaya apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan akuntabilitas publik tentang pendidikan yang dilaksanakannya?

b. Upaya apa saja yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan?

c. Upaya apa saja yang dilakukan kepala sekolah untuk mensosialisasikan konsep Manajemen Berbasis Sekolah kepada guru dan stakeholder?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiagnosis kesiapan lingkungan pendidikan sekolah dasar se Kecamatan Rancasari Kota Bandung dalam menyongsong pelaksanaan konsep Manajemen Berbasis Sekolah. Tujuan studi ini didasarkan pada pemikiran bahwa pelaksanaan konsep Manajemen Berbasis Sekolah perlu memperhatikan potensi, kebutuhan, dan permasalahan di lingkungan sekolah dasar. Hal tersebut, dilakukan mengingat lingkungan sekolah dasar memiliki karakteristik

tersendiri, sehingga diperlukan upaya penyesuaian konsep manajemen berbasis sekolah dari konsep atau teori yang telah ada.

2. Tujuan Khusus

Secara operasional, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

a. Menganalisis aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah dasar se kecamatan Rancasari manakala Manajemen Berbasis Sekolah dilaksanakan.
b. Mendeskripsikan tingkat kesiapan sekolah dasar dalam menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah se Kecamatan Rancasari, yang meliputi aspek-aspek seperti: (1) organisasi sekolah, (2) kurikulum, (3) SDM, (4) kesiswaan, (5) sarana dan prasarana pendidikan, (6) anggaran, dan (7) partisipasi masyarakat.
c. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan dimensi pendukung Manajemen Berbasis Sekolah, yang meliputi pelaksanaan konsep akuntabilitas publik dalam pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan upaya mensosialisasikan konsep Manajemen Berbasis Sekolah kepada guru dan stakeholder.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pengembangan konsep Manajemen Berbasis Sekolah dalam lingkungan kontekstual sekolah dasar. Dengan dideskripsikannya kesiapan

lingkungan pendidikan sekolah dasar dalam menyongsong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, maka dapat dilakukan pengembanagn konsep-konsep Manjaemen Berbasis Sekolah dalam setting aplikasi di sekolah dasar.

2. Manfaat praktis

Dalam tatanan aplikasi, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Dapat dijadikan data masukan bagi pihak terkait, seperti Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan tentang permasalahan yang dihadapi oleh sekolah dasar sehubungan dengan program sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah.
b. Dapat dijadikan data masukan bagi pihak terkait, seperti Cabang Dinas Pendidikan tentang potensi yang dihadapi oleh sekolah dasar sehubungan dengan program sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah.
c. Dapat dijadikan data kajian bagi para administrator pendidikan tentang pola pengembangan konsep Manajemen Berbasis Sekolah dalam lingkungan kontekstual sekolah dasar.
d. Dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak sekolah dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan konsep Manjaemen Berbasis Sekolah di lingkungan sekolah.
e. Membantu upaya kepala sekolah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan pada level sekolah.